



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 170 / 15 / PIMP / 2026

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah disempurnakan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah tertanggal 23 September 2026 Nomor : 100.3.3.1/331 Tahun 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
5. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4) ;

16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 37);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/331 Tahun 2026 tertanggal 23 September 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 dan dengan Tindak Lanjut Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan struktur sebagai berikut :

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah     | Rp. 2.219.528.895.000,- |
| b. Belanja Daerah        | Rp. 2.368.102.450.000,- |
| Defisit                  | Rp. (148.573.555.000,-) |
| c. Pembiayaan Daerah     |                         |
| - Penerimaan Pembiayaan  | Rp. 148.573.555.000,-   |
| - Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,-                 |
| Pembiayaan Netto         | Rp. 148.573.555.000,-   |
| SiLPA                    | Rp. 0,-                 |

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 24 September 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

Ketua  
  
BONDAN MARUTOHENING

Wakil Ketua  
  
ZAENUDIN

Wakil Ketua  
  
UMAR SUJADI

Wakil Ketua  
  
SUYADI

Lampiran :

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang  
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang  
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Perubahan  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026  
Nomor 170 / 15 / PIMP / 2026  
Tanggal 24 September 2026

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | <b>TUJUAN EVALUASI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |
|    | <p>Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan:</p> <p>A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>B. Kepentingan umum;</p> | <p>Terima kasih kepada Gubernur telah melakukan evaluasi atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Semarang TA 2026 dan Raperbup Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Semarang TA 2026.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAK LANJUT |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <p>C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan</p> <p>D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),</p> <p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 111 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja</p> |               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| II | <b>KEBIJAKAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <p>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati Semarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, disampaikan kepada Gubernur</p> | <p>Terima kasih atas apresiasi yang Gubernur berikan. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Semarang akan tetap konsisten memperhatikan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                    | TINDAK LANJUT                                    |        |                                  |  |            |       |         |   |                                                                                                                   |                     |                    |                                                  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--|------------|-------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--|
|    | Jawa Tengah dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel 2.1, sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                                  |        |                                  |  |            |       |         |   |                                                                                                                   |                     |                    |                                                  |  |
|    | <p style="text-align: center;">Tabel 2.1</p> <p style="text-align: center;">Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD</p> <table> <tr> <th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Penetapan/<br/>Persetujuan/ Surat</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr> <tr> <th>Nomor</th><th>Tanggal</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)</td><td>900.1.1.1/134<br/>08</td><td>31<br/>Juli<br/>2026</td><td>Sesuai,<br/>(paling lambat minggu I bulan Agustus</td></tr> </table> |                                  |                    | No                                               | Uraian | Penetapan/<br>Persetujuan/ Surat |  | Keterangan | Nomor | Tanggal | 1 | Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) | 900.1.1.1/134<br>08 | 31<br>Juli<br>2026 | Sesuai,<br>(paling lambat minggu I bulan Agustus |  |
| No | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penetapan/<br>Persetujuan/ Surat |                    |                                                  |        | Keterangan                       |  |            |       |         |   |                                                                                                                   |                     |                    |                                                  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nomor                            | Tanggal            |                                                  |        |                                  |  |            |       |         |   |                                                                                                                   |                     |                    |                                                  |  |
| 1  | Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900.1.1.1/134<br>08              | 31<br>Juli<br>2026 | Sesuai,<br>(paling lambat minggu I bulan Agustus |        |                                  |  |            |       |         |   |                                                                                                                   |                     |                    |                                                  |  |

| NO | EVALUASI GUBERNUR |                                                                                                                                                      |                                                  |                    |                                                    | TINDAK LANJUT |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    | 2                 | Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang. | 900.1.1.1/134<br>09                              | 31<br>Juli<br>2026 | Sesuai,<br>(paling lambat minggu I bulan Agustus)  |               |
|    | 3                 | Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten                                                                          | 900.1.1.1/14<br>362/2026<br>170/10/PIMP<br>/2026 | 14<br>Agustus      | Sesuai,<br>(paling lambat minggu II bulan Agustus) |               |

| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVALUASI GUBERNUR |                                                                             |                                                  |                           |                                                                | TINDAK LANJUT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Semarang                                                                    |                                                  | 2026                      |                                                                |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Kesepakatan<br>Perubahan<br>Rancangan<br>Perubahan<br>PPAS<br>antara Kepala | 900.1.1.1/14<br>363/2026<br>170/11/PIMP<br>/2026 | 14<br>Agust<br>us<br>2026 | Sesuai,<br>(paling<br>lambat<br>minggu<br>II bulan<br>Agustus) |               |
| Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Semarang telah seluruhnya berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud Bab III.A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja |                   |                                                                             |                                                  |                           |                                                                |               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir IV.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <p>Dalam rangka menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 agar berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310, dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.</p> | <p>Saran Gubernur akan kami perhatikan. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TINDAK LANJUT |           |                           |           |                                                      |           |                                              |  |       |           |     |           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagaimana Tabel. 2.2 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 2.2</p> <p>Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</p> <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Perubahan RKPD Tahun 2026</th><th colspan="2">Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026</th><th colspan="2">Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026</th></tr><tr><th>Jml 1</th><th>Pagu (Rp)</th><th>Jml</th><th>Pagu (Rp)</th><th>Jml 1</th><th>Pagu (Rp)</th></tr></table> | No            | Uraian    | Perubahan RKPD Tahun 2026 |           | Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 |           | Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 |  | Jml 1 | Pagu (Rp) | Jml | Pagu (Rp) | Jml 1 | Pagu (Rp) | <p>Pemerintah Kabupaten Semarang selalu berusaha untuk menjaga konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan tidak menambah atau mengurangi Program, kegiatan dan sub kegiatannya.</p> |
| No | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           | Perubahan RKPD Tahun 2026 |           | Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 |           | Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 |  |       |           |     |           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jml 1         | Pagu (Rp) | Jml                       | Pagu (Rp) | Jml 1                                                | Pagu (Rp) |                                              |  |       |           |     |           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |                           |          |                           |      |                       | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Progr<br>am         | 274      |                           | 27<br>4  |                           | 274  |                       |               |                                                                                                                                                                                                              |
|    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kegia<br>tan        | 754      | 2.464.89<br>5.638.00<br>0 | 75<br>4  | 2.365.42<br>9.027.00<br>0 | 754  | 2.368.102.<br>450.000 |               |                                                                                                                                                                                                              |
|    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub<br>Kegiat<br>an | 178<br>7 |                           | 17<br>87 |                           | 1787 |                       |               |                                                                                                                                                                                                              |
|    | <p>Berdasarkan tabel 2.2 di atas, total Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah konsisten sesuai dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS hingga Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD pada Pemerintah Kabupaten Semarang. Namun hasil dari pencermatan pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah masih terdapat ketidaksesuaian dan perubahan yang signifikan pada alokasi anggaran diantaranya:</p> |                     |          |                           |          |                           |      |                       |               |                                                                                                                                                                                                              |
|    | <p>a. Badan Keuangan Daerah</p> <p>1) Sub Kegiatan 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp316.170.136.000,00, namun pada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang</p>                                                                                                                                                         |                     |          |                           |          |                           |      |                       |               | <p>1) Pengurangan anggaran sub kegiatan dapat kami jelaskan sebagai berikut:</p> <p>a) Sub kegiatan ini berkurang karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berkurang Rp106.394.989.000,00 menjadi Rp209.775.147.000,00;</p> <p>2) Sub Kegiatan 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp5.630.707.000,00, namun pada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bertambah Rp2.038.086.000,00 menjadi Rp7.668.793.000,00;</p> | <p>2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa Kabupaten Semarang sebesar Rp69.891.342.000,- dimana pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp177.451.734.000,- sehingga perlu pengurangan Pendapatan Dana Desa dan Belanja Transfer sebesar Rp107.560.392.000,00</p> <p>b) Adanya penambahan anggaran untuk kegiatan pilkades serentak sebesar Rp1.165.403.000,00</p> <p>2) Adanya penambahan anggaran untuk BTT untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, mengingat per 31 Agustus 2026 anggaran BTT hanya tersisa Rp1.866.055.000,00. Termasuk pada saat pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, anggaran yang semula dianggarkan pada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan sampah pada TPA Blondo, digeserkan ke Belanja Tidak Terduga sebesar Rp999.473.000,00.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>b. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan</p> <p>1) Sub Kegiatan 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp3.815.769.250,00, namun pada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berkurang Rp3.520.220.000,00 menjadi Rp295.549.250,00;</p> <p>2) Sub Kegiatan 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp2.747.838.250,00, namun pada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berkurang Rp1.997.120.000,00 menjadi Rp750.718.250,00;</p> | <p>1) Anggaran sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani berkurang karena tidak dilaksanakannya rencana belanja hibah Jalut. Sehingga dilakukan rasionalisasi untuk dialihkan ke prioritas lainnya.</p> <p>2) Anggaran sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani berkurang karena tidak dilaksanakannya rencana belanja hibah Jitut. Sehingga dilakukan rasionalisasi untuk dialihkan ke prioritas lainnya.</p> |
|    | <p>Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (output) serta target hasil (outcome) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Bahwa perubahan pada alokasi anggaran karena adanya penambahan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat. Perubahan pada alokasi anggaran baik berupa penambahan maupun pengurangan guna pencapaian kinerja yang lebih baik.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <p>Selanjutnya apabila terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang untuk selanjutnya agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang</p> | <p>Saran Gubernur akan kami perhatikan. Pemerintah Kabupaten Semarang akan secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TINDAK LANJUT |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <p>tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,</p> |               |

| NO         | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <p>Berkaitan dengan Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dapat disampaikan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.</p> | <p>Terima kasih atas apresiasi Gubernur.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD akan tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.</p> |
| <b>III</b> | <b>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <p>Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:</p>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>A. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/ atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diperlukan sehingga akan lebih informatif.</p> | <p>A. Terima kasih atas apresiasi yang Gubernur berikan. Pemerintah Kabupaten Semarang akan terus berusaha untuk mencantumkan penjelasan landasan dan/ atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan.</p> |
|    | <p>B. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp2.321.111.124.200,00 berkurang Rp101.582.229.200,00 menjadi Rp2.219.528.895.000,00 atau menurun sebesar 4,38%, secara umum dapat digambarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut:</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                  |                               |                                                          |                                     | TINDAK LANJUT                        |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|    | Tabel 3.1 Pendapatan Daerah                        |                               |                                                          |                                     |                                      |
|    | Uraian                                             | APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp) | Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp) | Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp) | Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%) |
|    | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                           | <b>2.321.111.124.200</b>      | <b>2.219.528.895.000</b>                                 | <b>(101.582.229.200)</b>            |                                      |
|    | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                      | <b>762.626.052.000</b>        | <b>762.337.475.000</b>                                   | <b>(288.577.000)</b>                | <b>34,35</b>                         |
|    | Pajak Daerah                                       | 448.778.885.000               | 448.778.885.000                                          | 0                                   |                                      |
|    | Retribusi Daerah                                   | 292.020.224.000               | 292.568.594.000                                          | 548.370.000                         |                                      |
|    | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan | 13.695.199.000                | 13.695.199.000                                           | 0                                   |                                      |
|    | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah          | 8.131.744.000                 | 7.294.797.000                                            | (836.947.000)                       |                                      |
|    | <b>Pendapatan Transfer</b>                         | <b>1.558.485.072.200</b>      | <b>1.457.191.420.000</b>                                 | <b>(101.293.652.200)</b>            | <b>65,65</b>                         |
|    | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat               | 1.404.412.409.000             | 1.304.007.217.000                                        | (100.405.192.000)                   |                                      |
|    | Pendapatan Transfer Antar Daerah                   | 154.072.663.200               | 153.184.203.000                                          | (888.460.200)                       |                                      |

| NO     | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINDAK LANJUT |                                       |                               |  |                                                |                               |                        |                                                |                               |                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|        | <p>Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                       |                               |  |                                                |                               |                        |                                                |                               |                        |
|        | <p>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD semula Rp762.626.052.000,00 berkurang Rp288.577.000,00 menjadi Rp762.337.475.000,00 atau menurun sebesar 0,04%. Sedangkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 34,35%. Selanjutnya target PAD tersebut diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:</p> <table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th><th rowspan="2">Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran</th><th rowspan="2">Selisih (Berkurang/Bertambah)</th><th rowspan="2">Persentase Selisih (%)</th></tr><tr><th>Anggaran</th><th>Realisasi s.d. 30</th></tr></table> | Uraian        | Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited | APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp) |  | Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran | Selisih (Berkurang/Bertambah) | Persentase Selisih (%) | Anggaran                                       | Realisasi s.d. 30             |                        |
| Uraian | Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                       | APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp) |  |                                                |                               |                        | Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran | Selisih (Berkurang/Bertambah) | Persentase Selisih (%) |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anggaran      | Realisasi s.d. 30                     |                               |  |                                                |                               |                        |                                                |                               |                        |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                       |                     |                     |                     |                     |      |          | TINDAK LANJUT |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|----------|---------------|
|    |                                                         | (Rp)                |                     | Juni<br>2026        | 2026 (Rp)           | (Rp) |          |               |
|    | Pajak Daerah                                            | 409.480.88<br>2.038 | 448.778.885<br>.000 | 174.142.1<br>21.383 | 448.778.885.0<br>00 | 0    | 0,0<br>0 |               |
|    | Pajak Reklame                                           | 5.072.687.4<br>37   | 5.280.000.00<br>0   | 2.532.810.4<br>06   | 5.280.000.000       | 0    | 0,00     |               |
|    | Pajak Air Tanah                                         | 8.895.485.60<br>0   | 30.511.173.0<br>00  | 4.973.194.6<br>09   | 30.511.173.000      | 0    | 0,00     |               |
|    | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 4.626.459.08<br>0   | 4.575.000.00<br>0   | 2.044.536.<br>000   | 4.575.000.000       | 0    | 0,00     |               |
|    | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 78.878.095.8<br>07  | 86.076.760.0<br>00  | 22.077.979<br>.383  | 86.076.760.000      | 0    | 0,00     |               |
|    | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)       | 85.672.630.9<br>71  | 67.500.000.0<br>00  | 29.985.072<br>.417  | 67.500.000.000      | 0    | 0,00     |               |
|    | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                   | 117.494.498.<br>493 | 118.526.983.<br>000 | 61.121.442<br>.568  | 118.526.983.00<br>0 | 0    | 0,00     |               |
|    | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                    | 73.546.097.6<br>50  | 74.528.432.0<br>00  | 32.853.539<br>.500  | 74.528.432.000      | 0    | 0,00     |               |
|    | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)         | 35.294.927.0<br>00  | 61.780.537.0<br>00  | 18.553.546<br>.500  | 61.780.537.000      | 0    | 0,00     |               |

| NO                                                      | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TINDAK LANJUT   |                                            |                               |   |                                                          |                                     |                        |                                                          |                                     |                        |                 |                 |                 |                 |   |      |               |               |               |               |               |   |      |                 |               |                |               |                |   |      |                                      |               |               |               |               |   |      |                                                         |                |                |                |                |   |      |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------|--|
|                                                         | <p>a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Target pendapatan Pajak Daerah tetap sebesar Rp448.778.885.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan pajak pada tabel 3.2:</p> <table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited (Rp)</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th><th rowspan="2">Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th><th rowspan="2">Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)</th><th rowspan="2">Persentase Selisih (%)</th></tr><tr><th>Anggaran</th><th>Realisasi s.d. 30 Juni 2026</th></tr><tr><td>Pajak Daerah</td><td>409.480.882.038</td><td>448.778.885.000</td><td>174.142.121.383</td><td>448.778.885.000</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pajak Reklame</td><td>5.072.687.437</td><td>5.280.000.000</td><td>2.532.810.406</td><td>5.280.000.000</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pajak Air Tanah</td><td>8.895.485.600</td><td>30.511.173.000</td><td>4.973.194.609</td><td>30.511.173.000</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</td><td>4.626.459.080</td><td>4.575.000.000</td><td>2.044.536.000</td><td>4.575.000.000</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</td><td>78.878.095.807</td><td>86.076.760.000</td><td>22.077.979.383</td><td>86.076.760.000</td><td>0</td><td>0,00</td></tr></table> | Uraian          | Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited (Rp) | APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp) |   | Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp) | Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp) | Persentase Selisih (%) | Anggaran                                                 | Realisasi s.d. 30 Juni 2026         | Pajak Daerah           | 409.480.882.038 | 448.778.885.000 | 174.142.121.383 | 448.778.885.000 | 0 | 0,00 | Pajak Reklame | 5.072.687.437 | 5.280.000.000 | 2.532.810.406 | 5.280.000.000 | 0 | 0,00 | Pajak Air Tanah | 8.895.485.600 | 30.511.173.000 | 4.973.194.609 | 30.511.173.000 | 0 | 0,00 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 4.626.459.080 | 4.575.000.000 | 2.044.536.000 | 4.575.000.000 | 0 | 0,00 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 78.878.095.807 | 86.076.760.000 | 22.077.979.383 | 86.076.760.000 | 0 | 0,00 |  |
| Uraian                                                  | Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                            | APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp) |   |                                                          |                                     |                        | Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp) | Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp) | Persentase Selisih (%) |                 |                 |                 |                 |   |      |               |               |               |               |               |   |      |                 |               |                |               |                |   |      |                                      |               |               |               |               |   |      |                                                         |                |                |                |                |   |      |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anggaran        | Realisasi s.d. 30 Juni 2026                |                               |   |                                                          |                                     |                        |                                                          |                                     |                        |                 |                 |                 |                 |   |      |               |               |               |               |               |   |      |                 |               |                |               |                |   |      |                                      |               |               |               |               |   |      |                                                         |                |                |                |                |   |      |  |
| Pajak Daerah                                            | 409.480.882.038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 448.778.885.000 | 174.142.121.383                            | 448.778.885.000               | 0 | 0,00                                                     |                                     |                        |                                                          |                                     |                        |                 |                 |                 |                 |   |      |               |               |               |               |               |   |      |                 |               |                |               |                |   |      |                                      |               |               |               |               |   |      |                                                         |                |                |                |                |   |      |  |
| Pajak Reklame                                           | 5.072.687.437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.280.000.000   | 2.532.810.406                              | 5.280.000.000                 | 0 | 0,00                                                     |                                     |                        |                                                          |                                     |                        |                 |                 |                 |                 |   |      |               |               |               |               |               |   |      |                 |               |                |               |                |   |      |                                      |               |               |               |               |   |      |                                                         |                |                |                |                |   |      |  |
| Pajak Air Tanah                                         | 8.895.485.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.511.173.000  | 4.973.194.609                              | 30.511.173.000                | 0 | 0,00                                                     |                                     |                        |                                                          |                                     |                        |                 |                 |                 |                 |   |      |               |               |               |               |               |   |      |                 |               |                |               |                |   |      |                                      |               |               |               |               |   |      |                                                         |                |                |                |                |   |      |  |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 4.626.459.080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.575.000.000   | 2.044.536.000                              | 4.575.000.000                 | 0 | 0,00                                                     |                                     |                        |                                                          |                                     |                        |                 |                 |                 |                 |   |      |               |               |               |               |               |   |      |                 |               |                |               |                |   |      |                                      |               |               |               |               |   |      |                                                         |                |                |                |                |   |      |  |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 78.878.095.807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86.076.760.000  | 22.077.979.383                             | 86.076.760.000                | 0 | 0,00                                                     |                                     |                        |                                                          |                                     |                        |                 |                 |                 |                 |   |      |               |               |               |               |               |   |      |                 |               |                |               |                |   |      |                                      |               |               |               |               |   |      |                                                         |                |                |                |                |   |      |  |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                 |                             |                                                |                                      |                        | TINDAK LANJUT |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|
|    | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85.672.630.971                             | 67.500.000.000  | 29.985.072.417              | 67.500.000.000                                 | 0                                    | 0,00                   |               |
|    | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117.494.498.493                            | 118.526.983.000 | 61.121.442.568              | 118.526.983.000                                | 0                                    | 0,00                   |               |
|    | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73.546.097.650                             | 74.528.432.000  | 32.853.539.500              | 74.528.432.000                                 | 0                                    | 0,00                   |               |
|    | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35.294.927.000                             | 61.780.537.000  | 18.553.546.500              | 61.780.537.000                                 | 0                                    | 0,00                   |               |
|    | <p>Selanjutnya, target pendapatan Retribusi Daerah semula Rp292.020.224.000,00 bertambah Rp548.370.000,00 menjadi Rp292.568.594.000,00 atau meningkat sebesar 0,19% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan retribusi pada tabel 3.3 sebagai berikut:</p> |                                            |                 |                             |                                                |                                      |                        |               |
|    | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited (Rp) | APBD Tahun      |                             | Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran | Selisih (Berkurang / Bertambah) (Rp) | Persentase Selisih (%) |               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | Anggaran        | Realisasi s.d. 30 Juni 2026 |                                                |                                      |                        |               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                 |                 |                 |                 |             |      | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                 |                 |                 | n 2026<br>(Rp)  |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Retribusi Daerah             | 289.099.938.151 | 292.020.224.000 | 143.376.133.259 | 292.568.594.000 | 548.370.000 | 0,19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Retribusi Jasa Umum          | 259.017.180.539 | 258.538.731.000 | 126.752.892.612 | 258.638.701.000 | 99.970.000  | 0,04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Retribusi Jasa Usaha         | 24.217.512.988  | 28.147.413.000  | 13.813.511.520  | 28.205.013.000  | 57.600.000  | 0,20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Retribusi Perizinan Tertentu | 5.865.244.624   | 5.334.080.000   | 2.809.729.127   | 5.724.880.000   | 390.800.000 | 7,33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | <p>Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun</p> |                              |                 |                 |                 |                 |             |      | <p>Pemerintah daerah dalam menetapkan target pendapatan sudah mempertimbangkan kondisi makro ekonomi daerah dan berdasarkan potensi pajak serta retribusi daerah. Selain itu juga mempertimbangkan pencapaian realisasi pajak maupun retribusi daerah pada semester pertama (per Juni 2026).</p> <p>Penetapan target pendapatan Pajak dan Retribusi pada Perubahan APBD Tahun 2026 tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 100.3.3.2/ 0270/ 2026 tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> |  |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <p>Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p>                                   | <p>Dalam penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta berpedoman pada undang-undang 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>                                                                                                                                                                        |
|    | <p>Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana</p> | <p>Saran Gubernur akan kami perhatikan. Terkait dengan beberapa saran Gubernur tersebut sudah kami lakukan yaitu terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Optimaslisasi kegiatan pemungutan pajak daerah dengan melakukan penegakan perda, sosialisai dan dengan pemberian kemudahan dalam cara pembayaran melalui aplikasi pembayaran secara On line dan pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak dan SKPD Pengelola Pendapatan</li> </ol> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>dimaksud butir III.B.1.a.17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>b. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinventasi, kemudahan dalam perijinan membuka usaha dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat salah satunya dengan dibukanya Mall Pelayanan Publik.</p> <p>c. Prognosis target pendapatan sudah dilakukan secara rutin dengan adanya evaluasi atas target pendapatan yang dicapai. Ke depan akan dilakukan kajian atas potensi pendapatan pada masing-masing SKPD terkait di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mengetahui potensi pondapatan yang ada.</p> |
|    | <p>Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan:</p> <p>1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta pada butir III.B.1.a.15) Lampiran</p> | <p>Pemerintah Kabupaten Semarang telah memperhatikan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah dalam penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penetapan target pendapatan daerah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, kondisi dan perkembangan potensi pendapatan daerah, serta</p>                                                                                 |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;</p> <p>2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;</p> <p>3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana dimaksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;</p> <p>4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen), sebagaimana dimaksud pada butir III.B.1.a.15).e).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;</p> <p>5) Target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 agar disesuaikan dengan mempertimbangkan capaian realisasi Tahun Anggaran 2025 serta perkembangan realisasi penerimaan sampai</p> | <p>kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah.</p> <p>Adapun tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dimaksud sebagai berikut:</p> <p><b>1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b></p> <p>Pemerintah Kabupaten Semarang telah memperhatikan ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p> <p>Kebijakan tersebut diperhitungkan dalam penetapan target pendapatan dengan tetap memperhatikan potensi riil penerimaan, ketentuan pemberian</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                      | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>dengan 30 Juni 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan agar target yang ditetapkan lebih realistis, optimal, dan mampu mencerminkan potensi penerimaan daerah secara lebih akurat.</p> | <p>keringanan atau pengurangan yang berlaku, serta prinsip kehati-hatian agar target pendapatan yang ditetapkan tetap realistis dan dapat dicapai.</p> <p><b>2) Kebijakan fiskal nasional</b></p> <p>Dalam penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Semarang telah memperhatikan arah dan kebijakan fiskal nasional serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Penyesuaian target pendapatan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi, kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan perpajakan nasional, serta dampaknya terhadap kemampuan fiskal dan potensi penerimaan daerah.</p> <p><b>3) Dana insentif fiskal untuk mendukung kemudahan berinvestasi</b></p> <p>Kebijakan pemberian insentif fiskal dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kepentingan pembangunan daerah,</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <p>peningkatan investasi, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam jangka menengah dan panjang.</p> <p><b>4) Insentif pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional Alat Peralatan Pertahanan Keamanan</b></p> <p>Pemerintah Kabupaten Semarang memperhatikan ketentuan mengenai pemberian insentif pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah serta ketentuan yang berlaku dalam pemungutan PBBKB.</p> <p><b>5) Penyesuaian target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB</b></p> <p>Pemerintah Kabupaten Semarang telah memperhatikan hasil evaluasi terkait target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penetapan dan/atau penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan <b>capaian realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2025 serta perkembangan realisasi penerimaan 2026</b>, sehingga target yang ditetapkan dapat lebih realistis, optimal, dan mencerminkan</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>potensi penerimaan daerah.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Semarang terus melakukan koordinasi dengan UPPD Ungaran/Samsat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh informasi perkembangan penerimaan dan potensi Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian target.</p> |
|    | <p>a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</p> <p>Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap sebesar Rp13.695.199.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud butir III.B.1.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p> <p>Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah</p> | <p>Penetapan dan/atau penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan <b>capaian realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2025 serta perkembangan realisasi penerimaan 2026</b>, sehingga target yang ditetapkan dapat lebih realistis, optimal, dan mencerminkan potensi penerimaan daerah.</p>                               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TINDAK LANJUT |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <p>Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tetap sebesar Rp13.695.199.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;</li> <li>2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;</li> <li>3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;</li> <li>4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau</li> <li>5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;</li> </ol> |               |

| NO                                        | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TINDAK LANJUT                                            |                                      |                                                          |                                      |                        |                                           |               |               |               |         |                                           |             |             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</p> <p>Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp8.131.744.000,00 berkurang Rp836.947.000,00 menjadi Rp7.294.797.000,00 atau menurun sebesar 10,29% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Semarang untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Tabel 3.4<br/>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</p> <table><tr><th>Uraian</th><th>APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th><th>Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th><th>Selisih (Berkurang / Bertambah) (Rp)</th><th>Persentase Selisih (%)</th></tr><tr><td>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</td><td>8.131.744.000</td><td>7.294.797.000</td><td>(836.947.000)</td><td>(10,29)</td></tr><tr><td>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</td><td>701.500.000</td><td>701.500.000</td><td>0</td><td>0,00</td></tr></table> | Uraian                                                   | APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)        | Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp) | Selisih (Berkurang / Bertambah) (Rp) | Persentase Selisih (%) | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 8.131.744.000 | 7.294.797.000 | (836.947.000) | (10,29) | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 701.500.000 | 701.500.000 | 0 | 0,00 | <p>Pemerintah Kabupaten Semarang telah memperhatikan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terkait penyediaan anggaran target pendapatan <b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b> yang semula sebesar <b>Rp8.131.744.000,00</b> dan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disesuaikan berkurang sebesar <b>Rp836.947.000,00</b> menjadi <b>Rp7.294.797.000,00</b> atau mengalami penurunan sebesar <b>10,29%</b>.</p> <p>Penyesuaian target tersebut telah dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi penerimaan, potensi pendapatan yang masih dapat direalisasikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026, serta kondisi transaksi pada kas daerah. Dengan demikian, target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diupayakan lebih realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> |
| Uraian                                    | APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp) | Selisih (Berkurang / Bertambah) (Rp) | Persentase Selisih (%)                                   |                                      |                        |                                           |               |               |               |         |                                           |             |             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 8.131.744.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.294.797.000                                            | (836.947.000)                        | (10,29)                                                  |                                      |                        |                                           |               |               |               |         |                                           |             |             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 701.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 701.500.000                                              | 0                                    | 0,00                                                     |                                      |                        |                                           |               |               |               |         |                                           |             |             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                        | TINDAK LANJUT |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan<br>Jasa Giro<br>Hasil Pengelolaan Dana Bergulir<br>Pendapatan Bunga<br>Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah<br>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan<br>Pendapatan BLUD<br>Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah<br>Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah | 736.448.000<br>3.850.000.000<br>397.000.000<br>820.000.000<br>26.000.000<br>0<br>1.600.796.000<br>0<br>0 | 736.448.000<br>1.500.000.000<br>397.000.000<br>420.000.000<br>705.000.000<br>14.000.000<br>1.453.226.000<br>7.000.000<br>1.360.623.000 | 0<br>(2.350.000.000)<br>0<br>(400.000.000)<br>679.000.000<br>14.000.000<br>(147.570.000)<br>7.000.000<br>1.360.623.000 | 0,00<br>(61,04)<br>0,00<br>(48,78)<br>2611,54<br>-<br>(9,22)<br>-<br>- |               |
|    | <b>1. Pendapatan Transfer</b><br><br>Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula Rp1.558.485.072.200,00 berkurang Rp101.293.652.200,00 menjadi Rp1.457.191.420.000,00 atau menurun sebesar 6,50%. Sedangkan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 65,65%. Selanjutnya target Pendapatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                        |               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Transfer tersebut diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <p>1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</p> <p>Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.404.412.409.000,00 berkurang Rp100.405.192.000,00 menjadi Rp1.304.007.217.000,00 atau turun 7,15%, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:</p> <p>a) Dana Desa semula Rp177.451.734.000,00 berkurang Rp107.560.392.000,00 menjadi Rp69.891.342.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp69.891.342.000,00;</p> <p>b) Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp21.088.082.000,00 bertambah Rp8.093.789.000,00 menjadi Rp29.181.871.000,00. Alokasi</p> | <p>a) Besaran alokasi pendapatan Dana Desa Sudah sesuai</p> <p>b) Besaran alokasi pendapatan Dana Bagi hasil (DBH) sudah sesuai)</p> <p>c) Besaran alokasi Dana Alokasi Umum tidak sesuai dikarenakan adanya Silpa dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun anggaran 2025 sebesar Rp23.560.000,00. DAK non Fisik tersebut di tahun 2026 tidak mendapatkan alokasi, sehingga mengurangi salur dari Dana Alokasi Umum.</p> <p>d) DAK Fisik sudah sesuai</p> <p>e) Untuk alokasi Silpa DAK Non Fisik tidak sesuai karena adanya Silpa DAK Non Fisik tahun anggaran 2025 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Silpa BOP PAUD sebesar Rp7.875.000,000</li> <li>2. Silpa BOK Dinas Kesehatan sebesar</li> </ol> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 sebesar Rp12.138.807.000,00, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/475 Tahun 2025 sebesar Rp8.949.283.000,00 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026 sebesar Rp8.093.781.000,00;</p> <p>c) Dana Alokasi Umum (DAU) semula Rp834.208.789.000,00 berkurang Rp23.560.000,00 menjadi Rp834.185.229.000,00. Alokasi tersebut tidak sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 sebesar Rp834.208.789.000,00;</p> <p>d) DAK Fisik dialokasikan tetap sebesar Rp14.573.354.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025;</p> <p>e) DAK Non Fisik semula Rp357.090.450.000,00</p> | <p>Rp539.566.881.000,00</p> <p>3. Silpa BOK POM sebesar Rp1.247.600,00</p> <p>4. Silpa BOKB sebesar Rp89.149.548.000,00</p> <p>5. Silpa BOK di 26 Puskesmas sebesar Rp277.189.712,00</p> <p>Total Silpa DAK Non Fisik Rp915.028.741,00 (dibulatkan Rp915.029.000,00).</p> <p>Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus non Fisik pasal 47.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>berkurang Rp915.029.000,00 menjadi Rp356.175.421.000,00. Alokasi tersebut tidak sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 sebesar Rp357.090.450.000,00.</p> <p>Dalam hal terdapat selisih penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan penyesuaian atas besaran alokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <p>1) Pendapatan Transfer Antar Daerah</p> <p>Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp154.072.663.200,00 berkurang Rp888.460.200,00 menjadi Rp153.184.203.000,00 atau turun 0,58%, yang diuraikan ke dalam rincian objek:</p> <p>a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak semula Rp127.613.663.200,00 bertambah Rp5.111.539.800,00 menjadi Rp132.725.203.000,00;</p>                                                                                                    | <p>Saran Gubernur akan kami perhatikan. Ke depan akan selalu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk memperoleh alokasi anggaran yang akurat terkait dengan alokasi anggaran Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Penetapan target pendapatan transfer antar daerah tersebut berdasarkan pada Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/13/2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Penyampaian DPPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, sebagai</p> |

| NO        | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi semula Rp26.459.000.000,00 berkurang Rp6.000.000.000,00 menjadi Rp20.459.000.000,00; Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait poin a) dan b) yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.</p>                                                                                            | <p>berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp132.725.203.000,00</li> <li>2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp20.459.000.000,00</li> </ol> |
| <b>IV</b> | <b>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|           | <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan</p> |                                                                                                                                                                                                                           |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 disampaikan sebagai berikut:</p>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <p>A. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, telah disertai penjelasan mengenai lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang agar mempertahankan konsistensi dalam penyajian informasi pada lampiran Rancangan Peraturan Bupati Semarang dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir III.A.5 dan IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p> | <p>Terima kasih atas apresiasi yang Gubernur berikan. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Semarang akan selalu mempertahankan konsistensi dalam penyajian informasi pada lampiran Rancangan Peraturan Bupati Semarang sebagaimana peraturan perundangan.</p> |

| NO                      | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAK LANJUT                                             |                                     |                                                           |                                     |                                   |                       |                   |                   |                  |  |                        |                          |                          |                       |              |                 |                   |                   |                |  |                         |                 |                 |                  |  |               |                |                |                |  |                 |               |               |             |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------|--|--|
|                         | <p>B. Alokasi Belanja Daerah</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp2.401.858.503.200,00 berkurang Rp33.756.053.200,00 menjadi Rp2.368.102.450.000,00 atau turun sebesar 1,41%, secara umum dapat digambarkan pada</p> <p>tabel 4.1 sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Uraian</th><th>APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th><th>Alokasi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th><th>Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)</th><th>Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)</th></tr><tr><td><b>BELANJA DAERAH</b></td><td>2.401.858.503.200</td><td>2.368.102.450.000</td><td>(33.756.053.200)</td><td></td></tr><tr><td><b>Belanja Operasi</b></td><td><b>1.914.368.959.793</b></td><td><b>1.937.127.509.856</b></td><td><b>22.758.550.063</b></td><td><b>81,80</b></td></tr><tr><td>Belanja Pegawai</td><td>1.049.478.218.110</td><td>1.083.665.037.798</td><td>34.186.819.688</td><td></td></tr><tr><td>Belanja Barang dan Jasa</td><td>811.304.842.383</td><td>781.106.789.758</td><td>(30.198.052.625)</td><td></td></tr><tr><td>Belanja Hibah</td><td>48.532.749.300</td><td>67.141.922.300</td><td>18.609.173.000</td><td></td></tr><tr><td>Belanja Bantuan</td><td>5.053.150.000</td><td>5.213.760.000</td><td>160.610.000</td><td></td></tr></table> | Uraian                                                    | APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)       | Alokasi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp) | Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp) | Rasio Terhadap Belanja Daerah (%) | <b>BELANJA DAERAH</b> | 2.401.858.503.200 | 2.368.102.450.000 | (33.756.053.200) |  | <b>Belanja Operasi</b> | <b>1.914.368.959.793</b> | <b>1.937.127.509.856</b> | <b>22.758.550.063</b> | <b>81,80</b> | Belanja Pegawai | 1.049.478.218.110 | 1.083.665.037.798 | 34.186.819.688 |  | Belanja Barang dan Jasa | 811.304.842.383 | 781.106.789.758 | (30.198.052.625) |  | Belanja Hibah | 48.532.749.300 | 67.141.922.300 | 18.609.173.000 |  | Belanja Bantuan | 5.053.150.000 | 5.213.760.000 | 160.610.000 |  |  |
| Uraian                  | APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alokasi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp) | Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp) | Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)                         |                                     |                                   |                       |                   |                   |                  |  |                        |                          |                          |                       |              |                 |                   |                   |                |  |                         |                 |                 |                  |  |               |                |                |                |  |                 |               |               |             |  |  |
| <b>BELANJA DAERAH</b>   | 2.401.858.503.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.368.102.450.000                                         | (33.756.053.200)                    |                                                           |                                     |                                   |                       |                   |                   |                  |  |                        |                          |                          |                       |              |                 |                   |                   |                |  |                         |                 |                 |                  |  |               |                |                |                |  |                 |               |               |             |  |  |
| <b>Belanja Operasi</b>  | <b>1.914.368.959.793</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.937.127.509.856</b>                                  | <b>22.758.550.063</b>               | <b>81,80</b>                                              |                                     |                                   |                       |                   |                   |                  |  |                        |                          |                          |                       |              |                 |                   |                   |                |  |                         |                 |                 |                  |  |               |                |                |                |  |                 |               |               |             |  |  |
| Belanja Pegawai         | 1.049.478.218.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.083.665.037.798                                         | 34.186.819.688                      |                                                           |                                     |                                   |                       |                   |                   |                  |  |                        |                          |                          |                       |              |                 |                   |                   |                |  |                         |                 |                 |                  |  |               |                |                |                |  |                 |               |               |             |  |  |
| Belanja Barang dan Jasa | 811.304.842.383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 781.106.789.758                                           | (30.198.052.625)                    |                                                           |                                     |                                   |                       |                   |                   |                  |  |                        |                          |                          |                       |              |                 |                   |                   |                |  |                         |                 |                 |                  |  |               |                |                |                |  |                 |               |               |             |  |  |
| Belanja Hibah           | 48.532.749.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67.141.922.300                                            | 18.609.173.000                      |                                                           |                                     |                                   |                       |                   |                   |                  |  |                        |                          |                          |                       |              |                 |                   |                   |                |  |                         |                 |                 |                  |  |               |                |                |                |  |                 |               |               |             |  |  |
| Belanja Bantuan         | 5.053.150.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.213.760.000                                             | 160.610.000                         |                                                           |                                     |                                   |                       |                   |                   |                  |  |                        |                          |                          |                       |              |                 |                   |                   |                |  |                         |                 |                 |                  |  |               |                |                |                |  |                 |               |               |             |  |  |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                         |                        |                        |                          |              |  | TINDAK LANJUT |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--|---------------|--|
|    | Sosial                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                          |              |  |               |  |
|    | <b>Belanja Modal</b>                                                                                                                                                                      | <b>110.977.760.407</b> | <b>165.884.517.144</b> | <b>54.906.756.737</b>    | <b>7,00</b>  |  |               |  |
|    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                         | 22.376.948.200         | 47.572.697.494         | 25.195.749.294           |              |  |               |  |
|    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                         | 22.018.910.000         | 23.586.804.662         | 1.567.894.662            |              |  |               |  |
|    | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                | 63.612.444.207         | 82.371.715.773         | 18.759.271.566           |              |  |               |  |
|    | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                          | 2.969.458.000          | 12.353.299.215         | 9.383.841.215            |              |  |               |  |
|    | <b>Belanja Tidak Terduga</b>                                                                                                                                                              | <b>9.000.000.000</b>   | <b>7.668.793.000</b>   | <b>(1.331.207.000)</b>   | <b>0,32</b>  |  |               |  |
|    | Belanja Tidak Terduga                                                                                                                                                                     | 9.000.000.000          | 7.668.793.000          | (1.331.207.000)          |              |  |               |  |
|    | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                                                                                                                                                   | <b>367.511.783.000</b> | <b>257.421.630.000</b> | <b>(110.090.153.000)</b> | <b>10,87</b> |  |               |  |
|    | Belanja Bagi Hasil                                                                                                                                                                        | 47.646.483.000         | 47.646.483.000         | 0                        |              |  |               |  |
|    | Belanja Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                  | 319.865.300.000        | 209.775.147.000        | (110.090.153.000)        |              |  |               |  |
|    | Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut: |                        |                        |                          |              |  |               |  |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <p>1. Belanja Pegawai</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Pegawai dianggarkan semula Rp1.049.478.218.110,00 bertambah Rp34.186.819.688,00 menjadi Rp1.083.665.037.798,00 atau meningkat 3,26%. Alokasi Belanja Pegawai sebesar 45,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang antara lain tercantum pada:</p> <p>a. Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp708.769.516.178,00 bertambah Rp183.793.886,00 menjadi Rp708.953.310.064,00 meningkat sebesar 0,03%, anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2026, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2026.</p> | <p>a. Dalam memperhitungkan belanja gaji dan tunjangan ASN sudah mempertimbangkan realisasi tahun berjalan dengan memerhatikan pegawai yang pensiun, kenaikan gaji berkala, KGB serta mencadangkan pula hutang atas PPh gaji dan tunjangan sebagai dampak dari perhitungan sistem core tax Direktorat Jenderal Pajak yang terbit di akhir tahun anggaran. Pada perubahan APBD 2026, untuk accres gaji 0,5%</p> <p>b. Dalam penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKM) sudah memperhitungkan realisasi tahun berjalan dan telah beberapa kali dilakukan koordinasi dan rekonsiliasi melalui zoom dengan BPJS terkait dengan ketersediaan anggaran belanja dimaksud.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TINDAK LANJUT |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <p>b. Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)</p> <p>1) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut:</p> <p>a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp35.005.601.675,00 berkurang Rp161.981.139,00 menjadi Rp34.843.620.536,00 menurun sebesar 0,46%;</p> <p>b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp180.000.000,00 dan</p> <p>c) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar Rp5.780.229,00,</p> <p>dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam melakukan perhitungan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan dimaksud berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun</p> |               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta butir III.C.1.a.1).d) dan butir III.C.1.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p>Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>Saran Gubernur akan kami perhatikan. Dalam penganggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p>2) Penyediaan anggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut:</p> <p>a) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, yang tercantum pada:</p> <p>(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.481.650.441,00 berkurang Rp229.542.420,00 menjadi Rp1.252.108.021,00 menurun sebesar 15,49%; dan</p> <p>(2) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp3.886.602.112,00 berkurang Rp202.422.218,00 menjadi Rp3.684.179.894,00 menurun sebesar 5,21%.</p> <p>b) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang tercantum pada:</p> <p>(1) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi</p> | <p>2) Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan. Dalam Penyediaan anggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Presiden</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp7.070.000,00; dan</p> <p>(2) Belanja Jaminan Kematian bagi DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp9.898.000,00.</p> <p>c) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi KDH/WKDH yang tercantum pada:</p> <p>(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar Rp241.933,00; dan</p> <p>(2) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/ WKDH dianggarkan tetap sebesar Rp423.150,00.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melakukan perhitungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah</p> | <p>Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TINDAK LANJUT |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <p>diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017,</p> |               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p> <p>Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <p>c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN</p> <p>Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp290.993.524.069,00 bertambah Rp34.539.170.846,00 menjadi Rp325.532.694.915,00 atau meningkat sebesar 11,87%. Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir III.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan</p> | <p>Kenaikan Tambahan Penghasilan ASN ini yang paling signifikan dikarenakan adanya penambahan anggaran anggaran yang bersumber dari DAK Non Fisik untuk Tunjangan Profesi guru (TPG) atas THR dan Gaji ke-13 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah. Alokasi anggaran untuk TPG sebesar Rp34.766.852.000,00 dan untuk Tamsil sebesar Rp401.500.000,00 dan sudah dialokasikan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TINDAK LANJUT                                                                                                                         |        |             |   |                 |                   |   |                                                                 |                 |   |                                                                                  |                 |   |                               |                   |   |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---|-----------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2026 kepada Menteri Dalam Negeri, apabila didalamnya terdapat kenaikan indeks besaran Tambahan Penghasilan ASN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Pergeseran 1 APBD TA 2026). |        |             |   |                 |                   |   |                                                                 |                 |   |                                                                                  |                 |   |                               |                   |   |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <p>Berkaitan dengan <i>Mandatory Spending</i> Belanja Pegawai yaitu Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD yang diuraikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 4.2<br/><i>Mandatory Spending</i> Belanja Pegawai</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Uraian</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Belanja Pegawai</td><td>1.083.665.037.798</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Faktor Pengurang)</td><td>192.727.133.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Total Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (1-2)</td><td>890.937.904.798</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Total Anggaran Belanja Daerah</td><td>2.368.102.450.000</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Persentase (3:4)</td><td>37,62%</td></tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel 4.2 di atas, Pemerintah Kabupaten</p> | No                                                                                                                                    | Uraian | Jumlah (Rp) | 1 | Belanja Pegawai | 1.083.665.037.798 | 2 | Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Faktor Pengurang) | 192.727.133.000 | 3 | Total Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (1-2) | 890.937.904.798 | 4 | Total Anggaran Belanja Daerah | 2.368.102.450.000 | 5 | Persentase (3:4) | 37,62% | Pemerintah Kabupaten Semarang akan berusaha untuk memenuhi belanja pegawai diluar tunjangan guru (TKD) maksimal 30% sampai dengan tahun 2027. Namun hal tersebut juga tergantung dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Misal, kebijakan pengangkatan PPPK Paruh Waktu mejadi Penuh Waktu, adanya pemotongan TKD dari Pemerintah Pusat, kebijakan kenaikan gaji dari pemerintah pusat untuk ASN. |
| No | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah (Rp)                                                                                                                           |        |             |   |                 |                   |   |                                                                 |                 |   |                                                                                  |                 |   |                               |                   |   |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1  | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.083.665.037.798                                                                                                                     |        |             |   |                 |                   |   |                                                                 |                 |   |                                                                                  |                 |   |                               |                   |   |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Faktor Pengurang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 192.727.133.000                                                                                                                       |        |             |   |                 |                   |   |                                                                 |                 |   |                                                                                  |                 |   |                               |                   |   |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | Total Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 890.937.904.798                                                                                                                       |        |             |   |                 |                   |   |                                                                 |                 |   |                                                                                  |                 |   |                               |                   |   |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | Total Anggaran Belanja Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.368.102.450.000                                                                                                                     |        |             |   |                 |                   |   |                                                                 |                 |   |                                                                                  |                 |   |                               |                   |   |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | Persentase (3:4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,62%                                                                                                                                |        |             |   |                 |                   |   |                                                                 |                 |   |                                                                                  |                 |   |                               |                   |   |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Semarang belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Pegawai diluar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <p>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Semarang memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target Pendapatan DAK Non Fisik terutama untuk Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru telah sesuai dengan alokasi pada Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025.</li> <li>2. Penggunaan rekening pendapatan untuk Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru dari DAK Non Fisik menggunakan rekening: <ul style="list-style-type: none"> <li>- DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru;</li> <li>- DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru;</li> <li>- DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru.</li> </ul> </li> <li>3. Menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target pendapatan DAK Non Fisik untuk Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru telah sesuai dengan alokasi pada Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025.</li> <li>2. Penggunaan rekening pendapatan untuk tunjangan dan tambahan penghasilan guru dari DAK Non Fisik juga telah sesuai dengan arahan Gubernur.</li> <li>3. Pemerintah Kabupaten Semarang akan berusaha untuk memenuhi belanja pegawai diluar tunjangan guru (TKD) maksimal 30% sampai dengan tahun 2027.<br/><br/>Namun hal tersebut juga tergantung dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Misal, kebijakan pengangkatan PPPK Paruh Waktu mejadi Penuh</li> </ol> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD, berdasarkan amanat butir III.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Waktu, adanya pemotongan TKD dari Pemerintah Pusat, kebijakan kenaikan gaji dari pemerintah pusat untuk ASN.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <p>2. Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Barang dan Jasa dianggarkan semula Rp811.304.842.383,00 berkurang Rp30.198.052.625,00 menjadi Rp781.106.789.758,00 atau 32,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> | <p>Saran Gubernur akan kami perhatikan.</p> <p>Alokasi belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TINDAK LANJUT |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <p>3. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial</p> <p>Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:</p> <p>a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp48.532.749.300,00 bertambah Rp18.609.173.000,00 menjadi Rp67.141.922.300,00 atau 2,84% dari</p> <p>total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah diuraikan sebagai berikut:</p> <p>1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, dianggarkan semula Rp5.054.500.000,00 bertambah Rp300.000.000,00 menjadi Rp5.354.500.000,00 atau naik sebesar 5,94%;</p> <p>2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dianggarkan semula Rp38.266.921.300,00 berkurang Rp22.555.267.000,00 menjadi Rp15.711.654.300,00 atau turun sebesar 58,94%;</p> <p>3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp5.211.328.000,00;</p> <p>4) Belanja Hibah Dana BOSP semula belum dianggarkan, pada</p> |               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp40.864.440.000,00; dan</p> <p>b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp5.053.150.000,00 bertambah Rp160.610.000,00 menjadi Rp5.213.760.000,00 atau 0,22% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Semarang disampaikan bahwa:</p> <p>a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana dimaksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah</p> | <p>a. Saran Gubernur akan kami perhatikan. Dalam penganggaran hibah maupun bansos, Pemerintah Kabupaten Semarang memperhatikan sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah. Pemberian hibah dan bansos dalam rangka untuk mendukung visi misi dan program Pemerintah Daerah dengan tetap berpedoman terhadap peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>b. Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.1.b.9) dan butir III.C.1.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;</p> <p>b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;</p> <p>c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil.</p> | <p>telah dilakukan proses evaluasi serta rekomendasi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Jika pada saat evaluasi awal memenuhi syarat namun dalam pelaksanaan dilakukan evaluasi ulang namun tidak dapat memenuhi syarat, maka tidak dapat dicairkan untuk hibah atau bansosnya.</p> <p>c. Salah satu pengendalian dilaksanakan sebagaimana poin b. untuk hibah ataupun bansos yang tidak dapat dilaksanakan pada saat penetapan APBD TA 2026, pada perubahan APBD 2026 ini digeserkan untuk mendanai prioritas kegiatan lainnya.</p> <p>Dalam merealisasikan belanja tetap mempedomani peraturan yang ada, jika memang tidak memenuhi syarat dan ketentuan maka belanja hibah maupun bansos tersebut tidak dapat dicairkan.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>4. Belanja Modal</p> <p>Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp110.977.760.407,00 bertambah Rp54.906.756.737,00 menjadi Rp165.884.517.144,00 atau sebesar 7,00% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut, meningkat sebesar 49,48% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:</p> <p>a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan semula Rp22.376.948.200,00 bertambah Rp25.195.749.294,00 menjadi Rp47.572.697.494,00 atau meningkat sebesar 112,60%;</p> <p>b) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan semula Rp63.612.444.207,00 bertambah Rp18.759.271.566,00 menjadi Rp82.371.715.773,00 atau meningkat sebesar 29,49%;</p> | <p>Terima kasih atas apresiasi Gubernur.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Semarang terus berupaya untuk meningkatkan belanja modalnya secara bertahap guna mencapai belanja infrastruktur pelayanan publik 40% di tahun 2027.</p> <p>Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar 28,90% naik sebesar 1,04% dibanding Penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp27,86%.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan semula Rp2.969.458.000,00 bertambah Rp9.383.841.215,00 menjadi Rp12.353.299.215,00 atau meningkat sebesar 316,01%;</p> <p>d) Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan semula Rp22.018.910.000,00 bertambah Rp1.567.894.662,00 menjadi Rp23.586.804.662,00 atau meningkat sebesar 7,12%.</p> <p>Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Semarang, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (output) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.</p> | <p>Saran Gubernur akan kami perhatikan. Penambahan anggaran belanja modal ini sudah mempertimbangkan waktu pelaksanaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak barang modal yang merupakan barang pabrikan, sehingga tidak memerlukan waktu pengerjaan yang lama</li> <li>2. Untuk kontruksi merupakan kontruksi sederhana, sehingga dengan waktu yang kurang lebih 5 bulan akan cukup untuk dilaksanakan</li> </ol> |
|    | <p>5. Belanja Tidak Terduga (BTT)</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp9.000.000.000,00 berkurang Rp1.331.207.000,00 menjadi Rp7.668.793.000,00 atau menurun 14,79%. Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan</li> </ol>                                                                                                                                   |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Semarang juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan</li> <li>2. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga</li> </ol> | <p>serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Untuk mendukung Tim Pengendali Infalsi Daerah telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor : 050/0038/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Di Kabupaten Semarang yang disediakan dukungan penganggarnya pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.</li> <li>c. Dalam rangka Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok pada saat mendesak dan belum tersedia anggarannya, Pemerintah Kabupaten Semarang merealisasikan belanja tidak terduga.</li> </ol> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TINDAK LANJUT |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <p>yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.C.3.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p>                                                                                                                                       |               |
|    | <p>C. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <p>1. SPM Bidang Pendidikan</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan,</p> |               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TINDAK LANJUT |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <p>dianggarkan semula sebesar Rp58.444.324.000,00 berkurang Rp4.017.892.523,00 menjadi sebesar Rp54.426.431.477,00 atau sebesar 25,01% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan diluar belanja pegawai pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp217.659.020.666,00.</p> <p>2. SPM Bidang Kesehatan</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp6.695.954.500,00 bertambah Rp747.460.500,00 menjadi sebesar Rp7.443.415.000,00 atau 1,96% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan diluar belanja pegawai pada Dinas Kesehatan dan Puskemas sebesar Rp379.088.448.391,00.</p> <p>3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp10.655.355.500,00 bertambah Rp395.250.902,00 menjadi sebesar Rp11.050.606.402,00 atau 11,31% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diluar belanja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum</p> |               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TINDAK LANJUT                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>sebesar Rp97.718.525.075,00.</p> <p>4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dianggarkan semula sebesar Rp112.643.000,00 bertambah Rp2.205.000,00 menjadi sebesar Rp114.848.000,00 atau 1,01% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diluar belanja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp11.329.666.100,00.</p> <p>5. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp2.288.207.700,00 berkurang Rp205.630.400,00 menjadi sebesar Rp2.082.577.300,00 atau 12,81% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum diluar belanja pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp16.251.440.900,00.</p> <p>6. SPM Bidang Sosial</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp1.625.222.600,00 bertambah Rp96.010.000,00</p> | <p>Saran Gubernur akan kami perhatikan.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Semarang akan selalu melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>menjadi sebesar Rp1.721.232.600,00 atau 19,11% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial diluar belanja pegawai pada Dinas Sosial sebesar Rp9.008.803.630,00.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada urusan pemerintahan pelayanan dasar, serta memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>                                                                                                                               | <p>pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada urusan pemerintahan pelayanan dasar, serta memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>                   |
|    | <p>D. Alokasi Anggaran Pendidikan</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Pendidikan untuk Mandatory Spending Belanja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp845.938.698.240,00 bertambah Rp31.393.257.456,00 menjadi sebesar Rp877.331.955.696,00 atau 35,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, telah memenuhi alokasi anggaran untuk belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang harus mempertahankan</p> | <p>Saran Gubernur Akan kami perhatikan.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Semarang akan selalu berupaya untuk konsisten dan berkesinambungan untuk terus mengalokasikan anggaran belanja Pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir V.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p> |                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <p>E. Alokasi Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Semarang berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dari semula sebesar Rp575.251.254.399 bertambah Rp42.727.195.384,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Saran Gubernur akan kami perhatikan.<br/>Pemerintah Kabupaten Semarang akan terus berupaya untuk meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja daerah sampai dengan tahun 2027.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINDAK LANJUT |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <p>menjadi sebesar Rp617.978.449.783,00 atau 28,90% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah/atau Desa.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun 2026 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta butir V.A.2.a dan butir V.A.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p> |               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>F. Alokasi Anggaran Pengawasan</p> <p>Dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang agar memperhatikan pemenuhan alokasi anggaran pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, alokasi anggaran pengawasan, tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah, semula sebesar Rp4.016.890.000,00 berkurang sebesar Rp683.326.000,00 menjadi sebesar Rp3.333.564.000,00 atau sebesar 0,14% dari total belanja daerah.</p> <p>Sesuai dengan butir V.C.35.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan total belanja daerah di atas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) wajib mengalokasikan anggaran untuk program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, alokasi anggaran pengawasan pada Rancangan</p> | <p>Saran Gubernur akan kami perhatikan. Dengan adanya penurunan dana transfer daerah dari pemerintah Pusat, pemerintah Kabupaten Semarang tetap berupaya untuk dapat menjalankan prioritas daerah maupun nasional dengan keterbatasan keuangan. Sehingga perlu dilakukan rasionalisasi terhadap beberapa belanja pada SKPD, termasuk didalamnya adalah anggaran untuk pengawasan.</p> <p>Namun dari anggaran pengawasan sebesar Rp3.333.564.000,00 diharapkan tidak mengganggu kinerja dari pengawasan.</p> <p>Jika kemampuan Keuangan Daerah terdapat peningkatan, anggaran pengawasan akan berusaha untuk dipenuhi sebagaimana ketentuan 0.50% dari total belanja daerah atau diatas Rp15.000.000.000,00.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang agar mempertimbangkan penyediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan dengan memperhatikan kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Semarang harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penandaan atau tagging belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;</li> <li>2. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Semarang telah melaksanakan tagging belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan Kecukupan anggaran pengawasan.</li> <li>2. Dalam memperkuat APIP, Pemerintah Daerah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telah tersedia anggaran untuk pengembangan kompetensi APIP, namun belum bisa memenuhi ketentuan 120 JP per APIP, sehingga</li> </ol> </li> </ol> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;</li> <li>2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;</li> <li>3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan</li> <li>4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi e-Reviu yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.</li> </ol> <p>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai</p> | <p>pemenuhannya melalui diklat online, zoom, Pelatihan di Kantor Sendiri;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Inspektorat telah melaksanakan pengawasan atas program PSN dalam bentuk pendampingan asistensi verifikasi data program PSN, serta melaksanakan mandatory pengawasan dari pemerintah pusat;</li> <li>3) pemenuhan APIP dilakukan secara bertahap;</li> <li>4) APIP telah melaksanakan peran dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan dengan aplikasi SIPD RI.</li> </ol> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir V.C.35.a, butir V.C.35.b dan butir V.C.35.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p>G. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN</p> <p>Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN dianggarkan semula sebesar Rp852.532.339,00 berkurang Rp98.240.339,00 menjadi sebesar Rp754.292.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang belum memenuhi alokasi Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN.</p> <p>Diharapkan Pemerintah Kabupaten Semarang agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang</p> | <p>Saran Gubernur akan kami perhatikan.</p> <p>Ke depan, Pemerintah Kabupaten Semarang akan berusaha untuk memenuhi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN untuk pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah.</p> <p>Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah mendorong agar ASN meningkatkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan, seminar melalui aplikasi daring yang banyak diselenggarakan oleh berbagai lembaga/ kementerian terkait.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <p>H. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Opsen PKB</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang bersumber dari penerimaan Opsen PKB, dianggarkan semula sebesar Rp9.683.855.066,00 berkurang Rp293.786.409,00 menjadi sebesar Rp9.390.068.657,00 atau 12,60% dari total Hasil Penerimaan Opsen PKB sebesar Rp74.528.432.000,00. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang telah memenuhi alokasi anggaran pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang bersumber dari Opsen PKB.</p> <p>Penggunaan Opsen PKB agar dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau</p> | <p>Terima kasih atas apresiasi Gubernur.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang akan selalu berusaha untuk memenuhi penggunaan Opsen PKB minimal 10% sesuai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <p>I. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum bersumber dari Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dianggarkan semula sebesar Rp41.660.577.700,00 bertambah Rp4.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp46.160.577.700,00 atau 64,62% dari total Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar Rp71.432.900.000,00. Pemerintah Kabupaten Semarang telah memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik tersebut.</p> <p>Penggunaan Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik agar dipertahankan atau ditingkatkan (paling sedikit 10%) untuk</p> | <p>Terima kasih atas apresiasi Gubernur.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang akan selalu berusaha untuk memenuhi penggunaan PBJT atas Tenaga Listrik minimal 10% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p>J. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok</p> <p>Alokasi anggaran untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok, dianggarkan tetap sebesar Rp50.532.471.900,00 atau 85,74% dari total Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp58.936.039.000,00 . Pemerintah Kabupaten Semarang telah memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok tersebut.</p> <p>Dengan rincian alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagai berikut:</p> | <p>Terima kasih atas apresiasi Gubernur.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang akan selalu berusaha untuk memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TINDAK LANJUT |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <p>a. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk pendanaan program JKN yang dianggarkan semula Rp41.989.197.600,00 bertambah Rp3.061.800,00 menjadi sebesar Rp41.992.259.400,00 atau 71,25% dari total Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp58.936.039.000,00. Alokasi tersebut memenuhi alokasi anggaran atas pendanaan program JKN.</p> <p>b. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk pendanaan diluar program JKN (dalam rangka penegakan hukum) yang dianggarkan semula Rp8.543.274.300,00 berkurang Rp3.061.800,00 menjadi sebesar Rp8.540.212.500,00 atau 14,49% dari total Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp58.936.039.000,00. Alokasi tersebut memenuhi alokasi anggaran atas pendanaan diluar program JKN (dalam rangka penegakan hukum).</p> <p>Pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari Pajak Rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang</p> |               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TINDAK LANJUT                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.</p> <p>Dalam rangka mendukung program JKN, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian Kabupaten/Kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak Kabupaten Semarang atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir III.B.1.a.3) dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p> |                                                                                                                                                |
|    | <p>K. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT)</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Terima kasih atas apresiasi Gubernur.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Semarang akan terus konsisten mengalokasikan 10% dari PAT untuk untuk</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TINDAK LANJUT                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah bersumber dari Penerimaan PAT, dianggarkan semula sebesar Rp Rp5.827.984.500,00 bertambah Rp411.815.000,00 menjadi sebesar Rp6.239.799.500,00 atau 20,45% dari total Hasil Penerimaan PAT sebesar Rp30.511.173.000,00. Pemerintah Kabupaten Semarang telah memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan PAT tersebut.</p> <p>Penggunaan Hasil Penerimaan PAT agar dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.</p> | <p>pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota.</p> |
|    | <p>L. Alokasi Dana Sinergitas</p> <p>Pemerintah Kabupaten Semarang agar mempertahankan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Pemerintah Kabupaten Semarang menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Pemerintah</p>                       |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>komitmen penganggaran dana sinergitas Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2026 yang telah melampaui ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Berdasarkan alokasi Tahun Anggaran 2026, dari target Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebesar Rp136.308.969.000, telah dialokasikan dana sinergitas sebesar Rp1.444.470.000,00 atau sebesar 1,06%. Atas komitmen tersebut disampaikan apresiasi dan terima kasih. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Semarang agar mengoptimalkan pemanfaatan dan mempercepat realisasi anggaran sinergitas dimaksud sehingga dapat memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi pendapatan daerah.</p> <p>Pemanfaatan dana sinergitas agar berpedoman pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 100.3.7.1/110/2024 dan Nomor 100.3.7.1/016/PKS/KJS/2024 yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang. Dana sinergitas antara lain dapat dimanfaatkan untuk penanganan piutang Pajak Kendaraan Bermotor,</p> | <p>Provinsi Jawa Tengah terhadap komitmen penganggaran dana sinergitas Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Pemerintah Kabupaten Semarang berkomitmen untuk mempertahankan alokasi dana sinergitas sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengalokasikan dana sinergitas sebesar <b>Rp1.444.470.000,00</b> atau <b>1,06%</b>, sehingga telah melampaui ketentuan alokasi sebagaimana diatur dalam PKS.</p> <p>Pemanfaatan anggaran sinergitas dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan usulan dari UPPD/Samsat Ungaran serta berpedoman pada <b>Perjanjian Kerja Sama Nomor 100.3.7.1/110/2024 dan Nomor 100.3.7.1/016/PKS/KJS/2024.</b> Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung optimalisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Samsat;</li> </ol> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>pelaksanaan edukasi dan sosialisasi perpajakan, serta penyediaan sarana dan prasarana dan dukungan mobilitas operasional dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan.</p> <p>Selain itu, Pemerintah Kabupaten Semarang wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sinergitas Optimalisasi Opsen Pajak bersama Kepala UPPD Ungaran dan menyampaikannya kepada Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah. RKT dimaksud sekurang-kurangnya memuat target, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, dan indikator capaian sinergitas dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. edukasi, sosialisasi dan penyebarluasan kebijakan perpajakan kepada masyarakat;</li> <li>3. pelaksanaan kegiatan operasi gabungan dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak;</li> <li>4. pelaksanaan kegiatan Sengkuyung dalam rangka penanganan tunggakan/piutang Pajak Kendaraan Bermotor;</li> <li>5. kegiatan koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan UPPD/Samsat Ungaran serta pemangku kepentingan terkait; dan</li> <li>6. dukungan kegiatan pelayanan dan operasional perpajakan sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dengan tetap memperhatikan prinsip <b>efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan</b>. Pelaksanaan kegiatan juga disesuaikan dengan kebutuhan riil yang diajukan oleh Samsat/UPPD</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <p>Ungaran serta memperhatikan kebijakan efisiensi belanja pemerintah sebagaimana ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Semarang melalui <b>Badan Keuangan Daerah</b> senantiasa melakukan koordinasi dengan <b>UPPD Ungaran/Samsat</b> dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sinergitas Optimalisasi Opsen Pajak. RKT tersebut disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, serta menjadi bahan koordinasi dan pelaporan kepada Bapenda Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Semarang akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta realisasi anggaran sinergitas agar pemanfaatannya semakin optimal dan memberikan dampak nyata terhadap <b>peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penanganan tunggakan/piutang Pajak Kendaraan Bermotor, serta peningkatan penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.</b></p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>M. Pembayaran Pajak Plat Merah</p> <p>Pemerintah Kabupaten Semarang agar segera memperkuat sinergi dengan UPPD Ungaran dan melakukan percepatan penyelesaian seluruh piutang pajak. Khusus kendaraan dinas/plat merah, Pemerintah Kabupaten Semarang wajib memastikan seluruh kendaraan terdata dan memiliki kecukupan anggaran pembayaran PKB, sehingga tidak terdapat tunggakan pajak kendaraan milik pemerintah daerah.</p>                                                                                                                                              | <p>Pemerintah Kabupaten Semarang bersinergi dengan UPPD Ungaran dan melakukan percepatan penyelesaian seluruh piutang pajak, melalui program sengkuyung prioritas.</p> <p>Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Semarang mengalokasikan untuk pembayaran pajak kendaraan plat merah sebesar Rp887.300.000,00.</p>                                                                                                                                                                                                            |
|    | <p>N. Anggaran Jaminan Sosial kepada Masyarakat</p> <p>Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Semarang, diantaranya pada rekening:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp44.619.750.000,00 bertambah Rp12.025.230.000,00 menjadi sebesar Rp56.644.980.000,00 atau meningkat sebesar 26,95%; dan</li> <li>2. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta</li> </ol> | <p>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran penetapan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (5.1.02.02.002.00003) dianggarkan sebanyak Rp44.619.750.000,00 selama 9 bulan dengan jumlah penyediaan kuota peserta 141.650;</li> <li>2. Anggaran penetapan Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (5.1.02.02.002.00004) dibagi oleh dua</li> </ol> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp5.283.180.000,00 bertambah Rp988.898.400,00 menjadi sebesar Rp6.272.078.400,00 atau meningkat sebesar 18,72%.</p> <p>sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 bahwa dalam rangka mewujudkan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 dan cakupan peserta aktif Program JKN mencapai minimal 80% terhadap penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Semarang agar menganggarkan iuran baik sebagian maupun seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI serta menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018</p> | <p>komponen kriteria pembayaran dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Iuran PBPU BP Pemda dianggarkan sebanyak Rp3.569.580.000,00 selama 9 bulan dengan jumlah penyediaan kuota peserta 141.650</li> <li>Bantuan Iuran PBPU Kelas 3 Mandiri dianggarkan sebanyak Rp1.713.600.000,00 selama 12 bulan dengan jumlah penyediaan kuota 51.000</li> <li>Total keduanya menjadi Rp5.283.180.000,00</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp44.619.750.000,00 dalam perubahan APBD 2026 bertambah Rp12.025.230.000,00 menjadi sebesar Rp56.644.980.000,00 atau meningkat sebesar 26,95% untuk menggenapi kebutuhan sampai Desember 2026 (12 bulan);</li> <li>Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp5.283.180.000,00 bertambah</li> </ol> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.</p> | <p>Rp988.898.400,00 menjadi sebesar Rp6.272.078.400,00 atau meningkat sebesar 18,72%. Kenaikan Belanja Bantuan Iuran jika dibagi dua komponen menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Iuran PBPU BP Pemda semula Rp3.569.580.000,00 menjadi Rp4.531.598.400 meningkat sebesar 26,95% untuk menggenapi kebutuhan 12 bulan sampai Desember 2026 (angka prosentase selaras dengan Iuran PBPU BP Pemda)</li> <li>Bantuan Iuran PBPU Kelas 3 Mandiri semula Rp1.713.600.000 menjadi Rp1.740.480.000 meningkat sebesar 1,56% disesuaikan dengan kebutuhan penyediaan bantuan iuran PBPU Mandiri Kelas 3 yang semakin meningkat.</li> </ol> <p>5. Pemenuhan kenaikan anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan penambahan jumlah penduduk yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 dan cakupan peserta</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>aktif Program JKN mencapai minimal 80% terhadap penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.</p> <p>6. Prediksi capaian UHC pada Desember 2026 sebesar 98,7% dan cakupan peserta aktif sebesar 80,5%</p> |
|    | <p>O. Alokasi Tematik Pangan</p> <p>Dalam rangka mendukung tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”, Pengalokasian APBD Pemerintah Kabupaten Semarang diprioritaskan pada penguatan ketahanan pangan. Sinkronisasi nomenklatur program daerah dengan indikator program delegasi gubernur harus diselesaikan sejak dini agar tidak menimbulkan sumbatan administratif saat evaluasi akhir di tingkat provinsi.</p> | <p>Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang tahun 2026 telah sesuai dengan target yang diteapkan Provinsi Jawa Tengah , yaitu sebesar 75,38.</p>                                                                                                                                                                 |
|    | <p>P. Alokasi 35 program delegasi Gubernur kepada Kabupaten/Kota</p> <p>Melalui program delegasi diharapkan anggaran Kabupaten</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Pemerintah Kabupaten Semarang selalu berkomitmen untuk mendukung 35 program delegasi Gubernur sebagai wujud dalam mendukung pencapaian visi misi</p>                                                                                                                                                            |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Semarang fokus dan mendukung penuntasan isu-isu mendasar Provinsi Jawa Tengah secara makro, seperti percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pemerataan infrastruktur, hingga ketahanan pangan sebagai tema pembangunan Jawa Tengah 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”</p> <p>Pemerintah Kabupaten Semarang tetap mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan/kegiatan bersifat riil pada perangkat daerah sebagai bentuk dukungan yang mencakup dalam 35 Program Delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam penyusunan APBD.</p> | <p>Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>Sebagai wujud dukungan terhadap alokasi 35 program delegasi Gubernur tersebut, tertuang didalam dokumen RKPD Perubahan 2026 pada Bab IV (Tabel 4.6 halaman IV-21 sampai dengan halaman IV-50).</p>                                                                  |
|    | <p>Q. Kecamatan Berdaya</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Saran Gubernur kami perhatikan. Pemerintah Kabupaten Semarang telah melakukan langkah langkah antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/ 0418/ 2025 tentang Pembina Kecamatan Berdaya tingkat Kabupaten;</li> </ol> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok <i>zillenial</i>, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau <i>sport center</i> melalui program Kecamatan Berdaya.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.</p> | <p>2. Menetapkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/0420/ 2025 tentang Tim Kecamatan Berdaya Tingkat Kecamatan.</p> <p>Beberapa SKPD berkolaborasi untuk mendukung Kecamatan Berdaya dengan program/ kegiatan/ sub kegiatan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan bantuan hukum non litigasi (penyuluhan hukum) bagi warga miskin dan/ atau tidak mampu bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang tersertifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum RI;</li> <li>2. Program Bantuan Pemakaman lansia dan disabilitas “Serasi Kasih”</li> <li>3. Bantuan alat bantu disabilitas</li> <li>4. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk melalui layanan jemput bola bagi penduduk rentan</li> </ol> <p>Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi;</p> |
|    | R. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Semarang secara aktif melakukan koordinasi berjenjang dengan Pemerintah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;</li> <li>2. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan SKPD terkait;</li> <li>3. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan BPD bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan SKPD terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;</li> <li>4. menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;</li> <li>5. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan</li> </ol> | <p>Provinsi Jawa Tengah dan mengonsolidasikan keterlibatan antar-SKPD di tingkat daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sinergi Lintas Sektoral: Mengorkestrasi kerja sama antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) selaku pengampu teknis perkoperasian dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) dalam memfasilitasi Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat desa.</li> <li>3. Harmonisasi Peran BUMDes dan KDKMP: Menyusun formulasi dan pemetaan hubungan kerja yang simbiotik untuk mencegah tumpang tindih maupun kanibalisme usaha. BUMDes difokuskan pada pengelolaan aset dan infrastruktur dasar desa, sedangkan KDKMP/KDMP difungsikan sebagai agregator komoditas utama dan rantai pasok ekonomi masyarakat desa.</li> <li>4. Pemerintah Kabupaten Semarang telah memberikan dukungan penganggaran dan fasilitas konkret yang memodelkan sinergi pembiayaan efisien (financial synergy). Tahun anggaran 2026 dialokasikan</li> </ol> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>6. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2026.</p> | <p>anggaran sebesar Rp200.238.000,00 untuk Pelatihan KDMP.</p> <p>5. Capaian Pembentukan 100%: Seluruh 235 KDKMP/KDMP di 235 desa/kelurahan se-Kabupaten Semarang telah resmi terbentuk dan Badan Hukumnya telah terbit 100%.</p> <p>Keberlanjutan Program pada APBD/ Perubahan APBD 2026: Pemerintah Daerah terus menjaga kesinambungan program melalui alokasi kegiatan pendampingan dan pelatihan lanjutan bagi pengurus KDKMP yang belum terjangkau pada angkatan sebelumnya.</p> <p>6. Proses pembinaan, pengawasan, dan pemantauan tata kelola KDKMP/KDMP dijalankan secara sistematis dan terstruktur hingga ke tingkat kecamatan dan desa:</p> <p>a) Kepatuhan Organisasi (RAT 100%): Melalui pendampingan intensif bersama perangkat Kecamatan (Camat), seluruh 235 KDKMP di Kabupaten Semarang telah sukses melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pertama kali</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <p>secara serentak pada awal tahun 2026 untuk Tutup Tahun Buku 2025.</p> <p>b) Inovasi Pemantauan Digital "Simkopdes": Dinas mengoperasikan sistem pelaporan keuangan dan administrasi berbasis web bernama Simkopdes (Sistem Informasi Koperasi Desa) sebagai instrumen digitalisasi mandiri. Aplikasi ini menjadi single gate untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memantau tata kelola dan perkembangan usaha koperasi secara real-time.</li> <li>2) Memfasilitasi penyusunan laporan keuangan mandiri yang akuntabel dan berstandar.</li> <li>3) Menjadi pintu masuk utama pemrosesan kemitraan strategis antara KDKMP dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga pembiayaan.</li> <li>4) Klinik Konsultasi dan Pendampingan Jemput Bola: Mengingat keterbatasan teknis akuntansi dari pendamping lapangan (PMO/Business Assistant pusat), Diskumperindag mengambil peran aktif</li> </ol> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | memberikan pendampingan door-to-door serta menyediakan layanan konsultasi bisnis dan analisis potensi desa berbasis <i>Business Model Canvas (BMC)</i> bagi para pengurus.                                                                           |
|    | <p>S. Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;</li> <li>2. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan</li> <li>3. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.</li> </ol> | Saran Gubernur kami perhatikan. Setelah dilakukan pencermatan ulang tidak ditemukan sub kegiatan yang perlu dilakukan pergeseran setelah Raperda Perubahan APBD TA 2026 dan Raperbup Penjabaran Perubahan APBD disampaikan Evaluasi kepada Gubernur. |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAK LANJUT                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <p>T. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026.</p> | <p>Saran Gubernur akan kami perhatikan.</p> |

| NO                                               | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TINDAK LANJUT                                            |                                     |                                                          |                                     |                          |  |  |  |                              |                       |                        |                       |                                                  |                |                 |                |                         |                       |                        |                       |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--|--|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                     |                                                          |                                     |                          |  |  |  |                              |                       |                        |                       |                                                  |                |                 |                |                         |                       |                        |                       |  |
| V                                                | KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                     |                                                          |                                     |                          |  |  |  |                              |                       |                        |                       |                                                  |                |                 |                |                         |                       |                        |                       |  |
|                                                  | <p>Penyediaan anggaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara umum dapat digambarkan pada tabel 5.1 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 5.1</p> <p style="text-align: center;">Pembiayaan Daerah</p> <table><tr><th>Uraian</th><th>APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th><th>Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th><th>Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)</th></tr><tr><td><b>PEMBIAYAAN DAERAH</b></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>Penerimaan Pembiayaan</b></td><td><b>80.747.379.000</b></td><td><b>148.573.555.000</b></td><td><b>67.826.176.000</b></td></tr><tr><td>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</td><td>80.747.379.000</td><td>148.573.555.000</td><td>67.826.176.000</td></tr><tr><td><b>Pembiayaan Netto</b></td><td><b>80.747.379.000</b></td><td><b>148.573.555.000</b></td><td><b>67.826.176.000</b></td></tr></table> | Uraian                                                   | APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)       | Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp) | Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp) | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> |  |  |  | <b>Penerimaan Pembiayaan</b> | <b>80.747.379.000</b> | <b>148.573.555.000</b> | <b>67.826.176.000</b> | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 80.747.379.000 | 148.573.555.000 | 67.826.176.000 | <b>Pembiayaan Netto</b> | <b>80.747.379.000</b> | <b>148.573.555.000</b> | <b>67.826.176.000</b> |  |
| Uraian                                           | APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp) | Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp) |                                                          |                                     |                          |  |  |  |                              |                       |                        |                       |                                                  |                |                 |                |                         |                       |                        |                       |  |
| <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                     |                                                          |                                     |                          |  |  |  |                              |                       |                        |                       |                                                  |                |                 |                |                         |                       |                        |                       |  |
| <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                     | <b>80.747.379.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>148.573.555.000</b>                                   | <b>67.826.176.000</b>               |                                                          |                                     |                          |  |  |  |                              |                       |                        |                       |                                                  |                |                 |                |                         |                       |                        |                       |  |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 80.747.379.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 148.573.555.000                                          | 67.826.176.000                      |                                                          |                                     |                          |  |  |  |                              |                       |                        |                       |                                                  |                |                 |                |                         |                       |                        |                       |  |
| <b>Pembiayaan Netto</b>                          | <b>80.747.379.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>148.573.555.000</b>                                   | <b>67.826.176.000</b>               |                                                          |                                     |                          |  |  |  |                              |                       |                        |                       |                                                  |                |                 |                |                         |                       |                        |                       |  |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <p>1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp80.747.379.000,00 bertambah Rp67.826.176.000,00 menjadi Rp148.573.555.000,00 atau meningkat sebesar 84,00%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Kabupaten Semarang harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.</p> | <p>Alokasi Silpa sebesar Rp148.573.555.000,00 terdiri dari alokasi Silpa yang beralamat maupaun Silpa bebas. Dan untuk yang beralamat sudah dialokasikan sesuai dengan peruntukannya masing-masing, diantaranya Silpa terikat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DAU Spesific Grant sebesar Rp2.099.512.851,00</li> <li>2. DAK Fisik sebesar Rp1.357.076.283,00</li> <li>3. DAK Non Fisik sebesar Rp39.482.442.696,00</li> <li>4. DBHCHT sebesar Rp1.671.482.835,00.</li> <li>5. DIF sebesar Rp1.105.007.834,00</li> <li>6. Dana BOSP sebesar Rp1.605.195,00</li> <li>7. BLUD sebesar Rp19.748.601.741,00</li> </ol> |
|    | 2. Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2025 dan Peraturan Daerah tentang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pemerintah Kabupaten Semarang telah memasang Silpa Tahun Anggaran 2025 pada Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025, bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi potensi penerimaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp148.573.555.000,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Semarang agar memastikan kembali potensi penerimaan SiLPA pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan SiLPA Tahun 2025 pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.</p> | <p>Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp148.573.555.000,00.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <p>3. Pembentukan Dana Cadangan belum dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada Racangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang disarankan untuk menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan sebagai upaya penyediaan pendanaan bagi pelaksanaan program dan/atau kegiatan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, khususnya</p>                                                                                               | <p>Penundaan pembentukan Perda Dana Cadangan dilakukan karena ketentuan mengenai pelaksanaan dan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2029 dan periode berikutnya belum sepenuhnya memiliki kepastian regulasi, termasuk terkait tahapan, jadwal, mekanisme, serta kebutuhan pendanaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan penetapan regulasi terlebih dahulu agar besaran Dana Cadangan dapat dihitung secara tepat, sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.</p> <p>Dalam pembentukan Dana Cadangan tersebut, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dalam rangka memperoleh informasi dan memastikan besaran kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.</li> </ol> | <p>undangan.</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Dana Cadangan pelaksanaan Pilkada Tahun 2029 akan kami ajukan usulan dalam Propemperda Tahun 2027.</p> |
| VI | LAIN-LAIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |
|    | <p>A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsiderans “menimbang” agar disempurnakan menjadi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Saran Gubernur akan kami laksanakan. Konsideran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 akan kami sesuaikan.</p>            |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TINDAK LANJUT |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <p>daerah disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan dilaksanakan dengan seadil adilnya sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2026 maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Semarang tahun anggaran 2026.</p> <p>c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan</p> |               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAK LANJUT |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <p>dalam bentuk peraturan daerah.</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>2. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara</p> |               |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Republik Indonesia Nomor 6516).</p> <p>3. Pasal 9 ayat (1), kata “DPRD” agar dipanjangkan/tidak disingkat;</p> <p>4. Pasal 11, agar disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.</p>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|    | <p>B. Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026</p> <p>1. Dasar hukum “mengingat” angka 5 agar dihapus.</p> <p>2. Pasal 4, agar disempurnakan menjadi “Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p> | <p>Saran Gubernur akan kami laksanakan. Konsideran pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 akan kami sesuaikan.</p> |
|    | <p>C. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Terima kasih atas saran Gubernur. Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan.</p>                                                                      |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TINDAK LANJUT                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
|    | <p>D. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026.</p> | <p>Terima kasih atas saran Gubernur. Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan.</p> |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINDAK LANJUT                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | E. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                                                                               | Terima kasih atas saran Gubernur. Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan. |
|    | F. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini. | Terima kasih atas saran Gubernur. Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan. |
|    | G. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Terima kasih atas saran Gubernur. Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan. |

| NO     | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |        |                          |  |                          |                           |                               |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |                              |                 |                 |   |        |              |                 |                 |   |        |                  |                 |                 |   |        |                                                   |                |                |   |        |                        |               |               |   |     |                     |                   |                   |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|--|--|--|-----|------------------------------|-----------------|-----------------|---|--------|--------------|-----------------|-----------------|---|--------|------------------|-----------------|-----------------|---|--------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---|--------|------------------------|---------------|---------------|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|---|
|        | tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |        |                          |  |                          |                           |                               |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |                              |                 |                 |   |        |              |                 |                 |   |        |                  |                 |                 |   |        |                                                   |                |                |   |        |                        |               |               |   |     |                     |                   |                   |   |
|        | H. Selanjutnya, agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, baik dari aspek teknik penyusunan maupun substansi materi muatan, sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas.       | <p>Terima kasih atas saran Gubernur. Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan.</p> <p>Struktur Perubahan APBD 2026 setelah dilakukan penyesuaian atas Evaluasi Gubernur dapat kami sampaikan sebagai berikut:</p> <table><tr><th rowspan="2">KODE</th><th rowspan="2">URAIAN</th><th colspan="2">JUMLAH</th><th rowspan="2">BERTAMBAH / (BERKURANG )</th></tr><tr><th>Sebelum Evaluasi Gubernur</th><th>Penyesuaian Evaluasi Gubernur</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>4</td><td>PENDAPATAN DAERAH</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4,1</td><td>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</td><td>762.337.475.000</td><td>762.337.475.000</td><td>-</td></tr><tr><td>4.1.01</td><td>Pajak Daerah</td><td>448.778.885.000</td><td>448.778.885.000</td><td>-</td></tr><tr><td>4.1.02</td><td>Retribusi Daerah</td><td>292.568.594.000</td><td>292.568.594.000</td><td>-</td></tr><tr><td>4.1.03</td><td>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</td><td>13.695.199.000</td><td>13.695.199.000</td><td>-</td></tr><tr><td>4.1.04</td><td>Lain-lain PAD yang Sah</td><td>7.294.797.000</td><td>7.294.797.000</td><td>-</td></tr><tr><td>4,2</td><td>PENDAPATAN TRANSFER</td><td>1.457.191.420.000</td><td>1.457.191.420.000</td><td>-</td></tr></table> | KODE                          | URAIAN | JUMLAH                   |  | BERTAMBAH / (BERKURANG ) | Sebelum Evaluasi Gubernur | Penyesuaian Evaluasi Gubernur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | PENDAPATAN DAERAH |  |  |  | 4,1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 762.337.475.000 | 762.337.475.000 | - | 4.1.01 | Pajak Daerah | 448.778.885.000 | 448.778.885.000 | - | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 292.568.594.000 | 292.568.594.000 | - | 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.695.199.000 | 13.695.199.000 | - | 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 7.294.797.000 | 7.294.797.000 | - | 4,2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.457.191.420.000 | 1.457.191.420.000 | - |
| KODE   | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |        | BERTAMBAH / (BERKURANG ) |  |                          |                           |                               |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |                              |                 |                 |   |        |              |                 |                 |   |        |                  |                 |                 |   |        |                                                   |                |                |   |        |                        |               |               |   |     |                     |                   |                   |   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum Evaluasi Gubernur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penyesuaian Evaluasi Gubernur |        |                          |  |                          |                           |                               |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |                              |                 |                 |   |        |              |                 |                 |   |        |                  |                 |                 |   |        |                                                   |                |                |   |        |                        |               |               |   |     |                     |                   |                   |   |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                             | 5      |                          |  |                          |                           |                               |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |                              |                 |                 |   |        |              |                 |                 |   |        |                  |                 |                 |   |        |                                                   |                |                |   |        |                        |               |               |   |     |                     |                   |                   |   |
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |        |                          |  |                          |                           |                               |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |                              |                 |                 |   |        |              |                 |                 |   |        |                  |                 |                 |   |        |                                                   |                |                |   |        |                        |               |               |   |     |                     |                   |                   |   |
| 4,1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 762.337.475.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 762.337.475.000               | -      |                          |  |                          |                           |                               |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |                              |                 |                 |   |        |              |                 |                 |   |        |                  |                 |                 |   |        |                                                   |                |                |   |        |                        |               |               |   |     |                     |                   |                   |   |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 448.778.885.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 448.778.885.000               | -      |                          |  |                          |                           |                               |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |                              |                 |                 |   |        |              |                 |                 |   |        |                  |                 |                 |   |        |                                                   |                |                |   |        |                        |               |               |   |     |                     |                   |                   |   |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 292.568.594.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 292.568.594.000               | -      |                          |  |                          |                           |                               |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |                              |                 |                 |   |        |              |                 |                 |   |        |                  |                 |                 |   |        |                                                   |                |                |   |        |                        |               |               |   |     |                     |                   |                   |   |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.695.199.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.695.199.000                | -      |                          |  |                          |                           |                               |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |                              |                 |                 |   |        |              |                 |                 |   |        |                  |                 |                 |   |        |                                                   |                |                |   |        |                        |               |               |   |     |                     |                   |                   |   |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.294.797.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.294.797.000                 | -      |                          |  |                          |                           |                               |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |                              |                 |                 |   |        |              |                 |                 |   |        |                  |                 |                 |   |        |                                                   |                |                |   |        |                        |               |               |   |     |                     |                   |                   |   |
| 4,2    | PENDAPATAN TRANSFER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.457.191.420.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.457.191.420.000             | -      |                          |  |                          |                           |                               |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |                              |                 |                 |   |        |              |                 |                 |   |        |                  |                 |                 |   |        |                                                   |                |                |   |        |                        |               |               |   |     |                     |                   |                   |   |

| NO | EVALUASI GUBERNUR | TINDAK LANJUT |                                                               |                   |                   |   |
|----|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
|    |                   | 4.2.01        | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                          | 1.304.007.217.000 | 1.304.007.217.000 | - |
|    |                   | 4.2.02        | Pendapatan Transfer Antar Daerah                              | 153.184.203.000   | 153.184.203.000   | - |
|    |                   |               | Jumlah Pendapatan                                             | 2.219.528.895.000 | 2.219.528.895.000 |   |
|    |                   | 5             | BELANJA DAERAH                                                |                   | -                 | - |
|    |                   | 5,1           | BELANJA OPERASI                                               | 1.937.127.509.856 | 1.937.127.509.856 | - |
|    |                   | 5.1.01        | Belanja Pegawai                                               | 1.083.665.037.798 | 1.083.665.037.798 | - |
|    |                   | 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa                                       | 781.106.789.758   | 781.106.789.758   | - |
|    |                   | 5.1.05        | Belanja Hibah                                                 | 67.141.922.300    | 67.141.922.300    | - |
|    |                   | 5.1.06        | Belanja Bantuan Sosial                                        | 5.213.760.000     | 5.213.760.000     | - |
|    |                   | 5,2           | BELANJA MODAL                                                 | 165.884.517.144   | 165.884.517.144   | - |
|    |                   | 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 47.572.697.494    | 47.572.697.494    | - |
|    |                   | 5.2.03        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                             | 23.586.804.662    | 23.586.804.662    | - |
|    |                   | 5.2.04        | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                    | 82.371.715.773    | 82.371.715.773    | - |
|    |                   | 5.2.05        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 12.353.299.215    | 12.353.299.215    | - |
|    |                   | 5,3           | BELANJA TIDAK TERDUGA                                         | 7.668.793.000     | 7.668.793.000     | * |
|    |                   | 5.3.01        | Belanja Tidak Terduga                                         | 7.668.793.000     | 7.668.793.000     | * |
|    |                   | 5,4           | BELANJA TRANSFER                                              | 257.421.630.000   | 257.421.630.000   | * |
|    |                   | 5.4.01        | Belanja Bagi Hasil                                            | 47.646.483.000    | 47.646.483.000    |   |
|    |                   | 5.4.02        | Belanja Bantuan Keuangan                                      | 209.775.147.000   | 209.775.147.000   | - |
|    |                   |               | Jumlah Belanja                                                | 2.368.102.450.000 | 2.368.102.450.000 | - |
|    |                   |               | Total Surplus/(Defisit)                                       | (148.573.555.000) | (148.573.555.000) | * |
|    |                   | 6             | PEMBIAYAAN DAERAH                                             |                   | -                 | - |
|    |                   | 6,1           | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                         | 148.573.555.000   | 148.573.555.000   | - |
|    |                   | 6.1.01        | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya              | 148.573.555.000   | 148.573.555.000   | - |
|    |                   |               | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                 | 0,00              | -                 | - |
|    |                   |               | Pembiayaan Netto                                              | 148.573.555.000   | 148.573.555.000   | - |
|    |                   | 6,3           | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00              | -                 | - |

| NO | EVALUASI GUBERNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINDAK LANJUT                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>I. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Semarang.</p> | <p>Terima kasih atas saran Gubernur. Saran Gubernur akan kami perhatikan dan laksanakan.</p> |

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG



Ketua

BONDAN MARUTOHENING

Wakil Ketua

ZAENUDIN

Wakil Ketua

UMAR SUJADI

Wakil Ketua

SUYADI